**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini**

Anak usia dini jika dipandang dari usia kronologisnya, adalah anak yang berada pada usianol sampai delapan tahun. Dalam pedoman pengembangan anak ditujukan pada anak usia nolsampai enam tahun, karena pada usia tersebut merupakan masa keemasan bagi seorang manusiauntuk mengembangkan seluruh potensi perkembangan yang dimiliki (Yuliani Nuraini Sujiono2009 : 7).

Usia lahir sampai memasuki pendidikan dasar merupakan masa keemasan *(Golden Age)* sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan manusia, yang akan menentukan perkembangananak selanjutnya. Layanan pendidikan bagi anak usia dini merupakan bagian dari pencapaiantujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem PendidikanNasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya yaitumanusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memilikipengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap danmandiri serta tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Ace Suryadi 2005 : 25).

9

Depdiknas (2003: 1) Pendidikan bagi anak usia dini adalah ”pemberian upaya untuk menstimulasi,membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak”..

Oleh karena itu, Pendidikananak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkanpada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halusdan kasar), kecerdasan, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan jamak, dan kecerdasanspiritual.

Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini maka, penyelenggaraanpendidikan bagi anak usia dini diselesaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui olehanak usia dini.

Depdiknas-DirjenDikdasmen, Undang-Undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : Depdiknas-DirjenDikdasmen (2003:12), Pendidikan anak usia dini sebagaimana yang termasuk dalam Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 14menyatakan bahwa ”pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukankepadaanak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberianrangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaniagar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.

Berdasarkan kajian diatas dapat dideskripsikan bahwa anak usia dini adalah kelompokanak yang berusia 0-6 tahun yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik(motorik kasar dan motorik halus), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi dankecerdasan spritual), bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhandan perkembangan anak.

Pendapat lain dari Biehler dan Snowman dalam Soemiarti Patmonodewo (2003:44),menyatakan bahwa “anak usia pra sekolah adalah mereka yang sedang menjalani tahapperkembangan masa kanak-kanak, yaitu dari permulaan tahun ketiga sampai usia enam tahun”.

Selanjutnya banyak para ahli psiologi menguraikan ciri-ciri yang menonjol dariperkembangan anak selama tahun awal masa kanak-kanak, Elizabeth B. Hurlock (2002 : 109)menyatakan bahwa “anak pra sekolah memasuki usia masa penjelajah, masa bertanya, masameniru, dan masa kreatif. Pada usia kelompok ini anak mulai belajar interaksi sosial, masa inimemberikan kesempatan untuk anak mempelajari cara hidup bermasyarakat”. Pada masapenjelajah merupakan masa observasi bagi anak untuk mengetahui hal-hal yang beradadisekeliling anak, masa penjelajah ini diiringi dengan masa bertanya anak, karenakeingintahuannya yang tinggi hingga merangsang intelektual anak untuk berpikir, diikuti denganmasa meniru sadar atau tidak sadar anak akan meniru semua perbuatan orang dewasa sekitaranak, dilanjuti dengan masa kreatif dimana anak dapat mengembangkan daya imajinasinya.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjangpendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahirsampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untukmembantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapandalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal,dan informal.

Tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan kurun waktu yang sangat penting dankritis dalam hal tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial, yang berjalan sedemikiancepatnya sehingga keberhasilan tahun-tahun pertama untuk sebagian besar menentukan haridepan anak.

Penyelenggaraan pendidikan pada anak usia dini di negara maju telah berlangsung lamasebagai bentuk pendidikan yang berbasis masyarakat (*community based education*), akan tetapigerakan untuk menggalakkan pendidikan ini di Indonesia baru muncul beberapa tahun terakhir. Hal ini didasarkan akan pentingnya pendidikan untuk anak usia dini dalam menyiapkan manusiaIndonesia seutuhnya **(MANIS)**, serta membangun masa depan anak-anak dan masyarakatIndonesia seluruhnya **(MASIS)**. Namun sejauh ini jangkauan pendidikan anak usia dini masihterbatas dari segi jumlah maupun aksesibilitasnya. Misalnya, penitipan anak dan kelompokbermain masih terkonsentrasi di kota-kota. Padahal bila dilihat dari tingkat kebutuhannya akanperlakuan sejak dini, anak-anak usia dini di pedesaan dan dari keluarga miskin jauh lebih tinggiguna mengimbangi miskinnya rangsangan intelektual, sosial, dan moral dari keluarga dan orangtua.

Pernyataan ini menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting bagikelangsungan bangsa, dan perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pendidikan anak usiadini merupakan strategi pembangunan sumber daya manusia harus dipandang sebagai titiksentral mengingat pembentukan karakter bangsa dan kehandalan SDM ditentukan bagaimanapenanaman sejak anak usia dini. Pentingnya pendidikan pada masa ini sehingga sering disebutdengan **masa usia emas** (*the golden age*).

Pendidikan anak usia dini sangat diperlukan untuk menyiapkan pendidikan sedinimungkin, karena anak merupakan bagian dari masyarakat dan sekaligus penerus bangsa makapertumbuhan dan perkembangan yang diraih oleh anak tentunya harus sejalan dengan nilai-nilai,norma-norma, harapan masyarakat dan bangsa.

Berdasarkan Forum PAUD (2007:5), Pendidikan anak usia dini pelaksanaannyamenggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

**a) Berorientasi pada Kebutuhan Anak**

Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak.

**b) Belajar melalui bermain**

Bermain merupakan saran belajar anak usia dini. Melalui bermain anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan, memanfaatkan, dan mengambil kesimpulan mengenai benda di sekitarnya.

**c) Menggunakan lingkungan yang kondusif**

Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan melalui bermain.

**d) Menggunakan Pembelajaran Terpadu**

Pembelajaran pada anak usia dini harus menggunakan konsep pembelajaran terpadu yang dilakukan melalui tema. Tema yang dibangun harus menarik dan dapat membangkitkan minat anak dan bersifat kontekstual.

**e) Mengembangkan berbagai kecakapan hidup**

Mengembangkan keterampilan hidup dapat dilakukan melalui berbagai proses pembiasaan. Hal ini dimaksudkan agar anak belajar untuk menolong diri sendiri, mandiri dan bertanggungjawab serta memiliki disiplin diri.

**f) Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar**

Media dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan oleh pendidik /guru.

**g) Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar**

Pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari konsep yang sederhana dan dekat dengan anak. Agar konsep dapat dikuasai dengan baikhendaknya guru menyajikan kegiatan-kegiatan yang berluang.

**2. Upaya Masyarakat Dalam Penyelenggaraan PAUD**

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah selama ini telah berusaha mengembangkan banyak program pendidikan yang melibatkan berbagai lembaga yang ada dalam masyarakat, program pendidikan tersebut guna menjangkau seluruh warga masyarakat dari yang atas sampai lapisan paling bawah.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang amat mendasar dan strategi, karena masa usia dini merupakan masa emas dan peletak dasar (fondasi dasar) bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Lahirnya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yang memuat pasal khusus tentang PAUD merupakan bukti adanya komitmen nasional terhadap PAUD. Namun keberadaan PAUD yang belum menjadi pendidikan wajib, telah memberikan kesan seakan-akan pendidikan ini belum dianggap kebutuhan yang mendesak. Lebih-lebih untuk PAUD non formal (Kelompok Bermain, Taman penitipan anak-anak dan satuan PAUD lainnya yang sejenis). Dalam Pengembangan program PAUD di masyarakat dewasa ini, partisipasi aktif seluruh warga masyarakat dipandang sangat penting artinya bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tercapainya tujuan secara mantap. Oleh karena itu partisipasi masyarakat selalu diusahakan untuk dikembangkannya sejak awal pelaksanaan program, dan diharapkan bisa berlangsung terus sampai tercapainya tujuan program.

Dalam rangka mengembangkan peran serta masyarakat khususnya program PAUD, para tokoh masyarakat baik formal maupun non formal sangat penting peranannya, terutama dalam mempengaruhi, memberi contoh dan menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat lingkungan guna mendukung keberhasilan program. Lebih-lebih dalam masyarakat pedesaan, peran para tokoh masyarakat tersebut sangat kuat pengaruhnya, dan bahkan seringkali menjadi tokoh panutan dalam segala kegiatan hidup sehari-hari warga masyarakat.

Sebagian besar pelaksana PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan hanya sebagian yang ditangani oleh pemerintah, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator terhadap pelaksanaan PAUD yang ada selama ini. Lemahnya sosialisasi tentang penyelenggaraan PAUD selama ini berdampak negatif terhadap pelaksanaan program PAUD.

Partisipasi masyarakat secara luas memberikan andil yang besar terutama dalam mendukung sarana dan prasarana serta sumberdaya manusianya. Peran dan partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat mendasar, namun banyak kita jumpai ketimpangan yang ada dalam pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini. Ada yang sangat berhasil dilihat dari banyak dan lengkapnya fasilitas yang dimiliki di pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini serta sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pengelola dan sebagai Tutor. Di lain pihak banyak pula penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang tak mampu melaksanakan program kegiatannya, bahkan sekedar memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan.

Keterikatan masyarakat yang merupakan partisipasi aktif orang tua/ wali mencakup lebih luas, tidak terbatas masalah biaya, lebih luas lagi menyangkut kegiatan pendampingan, pendampingan disini adalah orangtua akan selalu mendampingi dan mengamati putra-putrinya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Setiap proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik/ tutor peran orang tua menjadi ganda, pertama orang tua/ wali warga belajar menjadi motivator bagi anak untuk lebih gairah dan muncul keberaniannya berinteraksi dengan teman-temannya dan lingkungan sosialnya.

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan financial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan.

Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah, sudah barang tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan, dalam bentuk: (a). Orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah. (b). Orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki oleh anaknya.

Keterlibatan ini menjadi hal penting dan mendasar, manakala warga belajar berada pada tahap penyesuaian awal. Alasan terkait pelibatan masyarakat adalah karena sepulang dari sekolah anak-anak akan kembali ke masyarakat. Meminta masyarakat untuk ikut pula mengawasi perkembangan atau perilaku anak ketika dia berada dimasyarakat. Dengan kata lain, menjadikan masyarakat sebagai rekan kerja. Apabila ini terjadi sinergi yang begitu mengagumkan antara pendidik, sekolah, dan pihak masyarakat, dan ini sangat membantu proses pembelajaran.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting artinya bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tercapainya tujuan secara mantap, dan diharapkan bisa berlangsung terus sampai tercapainya tujuan program.

**3. Partisipasi Masyarakat**

**a. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Slameto **(**2002:75) Istilah partisipasi secara umum dapat diartikan sebagai “keikutsertaan, atau keterlibatanseseorang baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam suatu kegiatan tertentu”. Katapartisipasi atau peranserta cukup luas dipakai dikalangan masyarakat hampir setiap organisasi,perkumpulan atau kegiatan selalu ditemukan kata peranserta atau partisipasi.

Menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Sebelum mengkaji lebih lanjut tentang hakikat partisipasi, menurut kamus besar bahasa Indonesia “partisipasi adalah ikut serta dalam suatu kegiatan. Sedangkan masyarakat adalah ekstensi yang hidup, dinamis dan selalu berkembang” (Hery Noer Aly dan Munzier Suparta, 2003:191).

Menurut Isbandi (2007: 27) mengemukakan bahwa:

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Berdasarkan defenisi partisipasi di atas, maka partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan Nampak jelas dalam UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 8 dan 9, menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, serta masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Namun, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam menyelenggarakan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sementara dukungan lain seperti pemikiran, moral, dan barang/jasa kurang diperhatikan. Akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat juga lemah. Sekolah tidak merasa berkeharusan untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan (*stakeholder*).

Masyarakat merupakan komponen utama terselenggaranya proses pendidikan. Kontribusi masyarakat di lingkungan sekolah perlu dioptimalkan sebagai upaya pemberdayaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah dengan paradigma pendidikan yang baru. Masyarakat dapat memberikan sumbangsihnya kepada sekolah dengan memberikan masukan-masukan terutama dalam penyusunan program-program sekolah.

Demikian juga dalam pelaksanaan program, dukungan masyarakat perlu dioptimalkan. Rencana Pengembangan Sekolah dibuat bersama-sama sekolah dan masyarakat, disampaikan secara terbuka, diperbaharui setiap tahun, dan dilaksanakan. Peningkatan peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan kondisi lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran anak. Untuk itu, sekolah perlu menggalang hubungan baik dengan masyarakat. Sekolah memiliki program-program yang perlu dipahami masyarakat, dan sekolah juga perlu mendengarkan saran-saran dari masyarakat. Apabila jalinan antara sekolah dan masyarakat tercipta dengan baik, maka dukungan dan bantuan masyarakat terhadap pemeliharaan dan peningkatan program sekolahpun akan kian terbuka.

Pendidikan yang baik tentu memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Simpati masyarakat terhadap sekolah perlu dibangun agar masyarakat juga memberikan kontribusinya secara aktif dan optimal. Namun demikian, harus diingat bahwa peran serta, dukungan, dan simpati masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan tidak dating dengan sendirinya. Sekolah perlu secara pro aktif dan kreatif mengembangkan hubungan kerjasama yang harmonis dan sinergis dengan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat menyumbangkan gagasan, membantu tenaga, memberikan kritik yang membangun, memberikan motivasi, menyumbangkan keahlian, serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan. Tapi tak sedikit diantara mereka (masyarakat) yang masih berpandangan bahwa pendidikan sebatas urusan pemerintah, sekolah, dan para guru. Hal ini banyak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, berbeda dengan negara maju.

**b. Bentuk-Bentuk Partisipasi**

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja  atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat seringkali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat “sulit diajak maju” oleh sebab itu kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat juga disebabkan karena sudah adanya campur tangan dari pihak penguasa. *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) menguraikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut : (1). Partisipasi Pasif / manipulatif dengan karakteristik masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelaksaan proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran. (2). Partisipasi Informatif memilki kararkteristik dimana masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian dan akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat. (3). Partisipasi konsultatif dengan karateristik masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, tidak ada peluang pembuatan keputusan bersama, dan para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagi masukan) atau

tindak lanjut (4). Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan korbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa intensif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajarann atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif dihentikan. (5). Partisipasi Fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah ada keptusan-keputusan utama yang di sepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya. (6). Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan dan cenderung melibatkan metoda interdisipliner yang mencari keragaman prespektik dalam proses belajar mengajar yang terstuktur dan sisteatis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegitan. (7). *Self mobilization* (mandiri) memiliki karakter masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lemabaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang

diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diwilayahnya.

Masyarakat harus mempunyai partisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat secara umum menurut Slameto dan Kriswandani (2002) dapat berupa:

1. Fasilitas yang bersifat fisik seperti tempat dan perlengkapan belajar di kelas, alat-alat pengajaran, buku-buku pelajaran, dan perlengkapan berbagai praktikan, perlengkapan keterampilan, dan lain-lain.
2. Fasilitas yang bersifat non fisik seperti waktu, kesempatan biaya dan berbagai aturan serta kebijaksanaan pimpinan sekolah.

Menurut Slameto dan Kriswandani (2002), bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok/bentuk, seperti berikut ini:

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan

Perencanaan pendidikan adalah hal yang sangat urgen dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena dari sanalah keseluruhan dari pelaksanaan hingga kualitas dan kompetensi *output* pendidikan ditentukan. Mengingat pendidikan adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam perencanaan sangatlah penting artinya. Perencanaan dimaksud bisa berupa perumusan visi dan misi pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak diawali dengan partisipasi masyarakat dalam fase perencanaan, sama halnya dengan arogan. Dengan kata lain, sekolah seperti telah benar-benar tahu terhadap apa yang dibutuhkan Manajemen Berbasis Sekolah dan diharapkan masyarakat darinya, sehingga tidak perlu melibatkan mereka untuk merumuskan ke mana sebenarnya pendidikan akan diarahkan.

1. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

Hal yang penting harus melibatkan masyarakat dalam pendidikan adalah pada penyelenggaraan pendidikan. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan antara lain adalah penerimaan siswa baru, pengadaan guru, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengawasan. Dengan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat dapat mengontrol penyelenggaraan tersebut. Di satu sisi bermanfaat untuk mendorong kesungguhan penyelenggara pendidikan agar senantiasa profesional dan berkualitas, sementara di sisi lain keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan akan makin menebalkan rasa memiliki masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Dengan hal ini loyalitas mereka dalam mendukung keberlangsungan pendidikan diharapkan akan semakin kuat. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, pendidikan akan dapat berjalan dengan efesien dan bahkan cenderung dapat menunjang kemudahan inovasi dan pengembangannya.

1. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pendidikan

Dalam pendidikan, evaluasi juga merupakan hal yang sangat urgen. Dari evaluasi ini, diharapkan dapat tergambar seluruh aktifitas yang dilakukan sekolah dalam rangka menjalankan program-program. Lewat pelaksanaan evaluasi akan diketahui apa saja kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang ada. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi menjadi hal penting karena merekalah pada dasarnya objek yang membutuhkan keberadaan pendidikan. Atas dasar kebutuhan dan semangat untuk meningkatkan taraf hidup merekalah pendidikan diselenggarakan. Dengnan keterlibatan mereka dalam evaluasi, akan menjadi jelas apa yang kurang dalam penyelenggaraan pendidikan dan apa yang perlu ditingkatkan.

Selanjutnya menurut Arif Budi (Slameto, 2002) partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkaitan dengan: (1) pengambilan keputusan, (2) pelaksanaan, (3) penilaian. Peran serta dalam mengambil keputusan misalnya ketika sekolah mengundang rapat bersama komite sekolah untuk membahas perkembangan sekolah, masyarakat yang dalam hal ini orang tua, anggota komite sekolah, atau wakil dari dunia bisnis dan industri secara bersama-sama memberikan sumbangan saran dan berkahir dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan keputusan yang telah disepakati, maka keputusan tersebut tentunya akan dilaksanakan dalam menunjang pencapaian mutu pendidikan. Dengan demikian masyarakat yang mendukung program sekolah hasil kesepakatan telah berperan serta dalam pelaksanaan. Demikian pula dalam perjalanan program, tentunya perlu control dan upaya-upaya untuk memperbaiki. Hal itu merupakan contoh peran serta masyarakat dalam mengevaluasi.

**c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Arif Budi Wuryanto (dalam Slameto, 2002:130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

1. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

1. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

1. Pekerjaan dan penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

1. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1. Kepercayaan diri masyarakat;
2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
3. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
6. Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggangan oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;
7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
9. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

Keikutsertaan masyarakat dalam suatu organisasi merupakan suatu wujud kesadaran dari seseorang, pengaruh dari orang lain atau kelompok yang pada akhirnya dapat memberikan pengaruh kepada suatu organisasi. Senada dengan hal itu Santoso (1998) mengemukakan unsur pokok partisipasi yaitu : (a). partisipasi merupakan keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah (b). partisipasi didasari atas kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk memberikan kepada kelompok (c). partisipasi dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dideskripsikan bahwa masyarakat akan turut berpartisipai jika partisipasi itu didasari kesediaan memberikan sumbangsih yang bersifat sukarela dan untuk mencapai tujuan kelompok dan kegiatan organisasi dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Proses partisipasi ada karena beberapa faktor yang mempengaruhi dan masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi jika kegiatan tersebut dinilai memberikan manfaat dalam kehidupan dan memperbaiki taraf hidupnya.

Margono Slamet (1985: 124-126) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu: (1). Adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi. (2). Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. (3). Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi lebih rinci Slamet menjelaskan tiga persyaratan yang menyangkut kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi adalah sebagai berikut:

1. **Kemauan**

Secara psikologis kemauan berpartisipasi muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan atau tekanan dari pihak luar). Tumbuh dan berkembangnya kemauan berpartisipasi sedikitnya diperlukan sikap-sikap yang: (1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan. (2) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya. (3) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas sendiri. (4) Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan tercapainya tujuan pembangunan. (5) Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

1. **Kemampuan**

Beberapa kemampuan yang dituntut untuk dapat berpartisipasi dengan baik itu antara lain adalah: (1) Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah. (2) Kemampuan untuk memahami kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. (3) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan serta sumber daya lain yang dimiliki.

1. **Kesempatan**

Berbagai kesempatan untuk berpartisipasi ini sangat dipengaruhi oleh: (1) Kemauan politik dari penguasa/pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan. (2) Kesempatan untuk memperoleh informasi. (3) Kesempatan untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya. (4) Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi tepat guna. (5) Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan mempergunakan peraturan, perizinan dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan. (6) Kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dideskripsikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi sangatlah dipengaruhi oleh lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di masyarakat, manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga menimbulkan sikap atau kesadaran untuk bertanggung jawab dalam memelihara lembaga masyarakat. Selain itu faktor pengaruh juga dapat mempengaruhi faktor seseorang untuk berpartisipasi yaitu menolak atau menerima suatu kegiatan yang dipengaruhi oleh suruhan, peniruan, internalisasi, ambivalen, dan

respon negatif yang pada akhirnya mempengaruhi faktor seseorang untuk turut serta

berpartisipasi atau tidak turut serta/menolak berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.Sebab, kesempatan dan kemampuan yang cukup, belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk (turut) membangun. Sebaliknya, adanya kemauan akan mendorong seseorang untuk meningkatkan kemampuan dan aktif memburu serta memanfaatkan setiap kesempatan (Mardikanto dalam Ravik Karsidi 2005 : 22). Selanjutnya Mardikanto menjelaskan beberapa kesempatan yang dimaksud adalah kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembagunan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan; sejak di tingkat pusat sampai di jajaran birokrasi yang paling bawah.

Selain hal tersebut terdapat kesempatan-kesempatan yang lain diantaranya kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan, kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan. Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat (termasuk peralatan perlengkapan penunjangnya).

Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, per-ijinan, dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan, dan Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat Adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi (Mardikanto dalam Ravik Karsidi, 2005 : 228) menjelaskan yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah : (1). Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya). (2). Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. (3). Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal.

**d. Partisipasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini**

Orang tua, sebagai anggota yang paling dominan dalam suatu kelompok sosial terkecil, yaitu keluarga, dalam menjalani peran dan fungsinya, dituntut partisipasinya dalam pendidikan anak-anaknya. Partisipasi orang tua terhadap pendidikan anak usia dini, tidak hanya diwujudkan dalam bentuk “menyekolahkan” anak dalam lembaga pendidikan anak usia dini, namun lebih pada upaya orang tua dalam ikut mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anaknya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Witherington (Dede Rosyada: 2001) bahwa pada dasarnya pendidikan adalah suatu proses yang sengaja dilakukan untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan seseorang. Menyediakan lingkungan dan sarana belajar yang kondusif, berinteraksi dengan anak secara emosional dan intelektual, memberikan kesempatan anak untuk dapat bereksplorasi dalam lingkungan yang lebih luas, memberikan keteladanan yang baik, menanamkan kebiasaan yang baik bagi anak di rumah, mengadakan komunikasi yang baik dengan pihak “sekolah” merupakan wujud nyata partisipasi orang tua dalam pendidikan anak usia dini.

Menurut Lee (Slameto, 2002) mengkategorikan partisipasi orang tua ke dalam enam tipe keterlibatan, yaitu (1) *parenting* atau pola asuh, yang ditujukan sebagai membangun lingkungan rumah untuk mendorong anak-anak sebagai murid; (2) *communicating* atau komunikasi, didesain dari bentuk komunikasi sekolah-rumah dan rumah-sekolah yang efektif tentang program-program sekolah dan kemajuan anak; (3) *volunteering* atau sukarelawan, dengan merekrut dan mengatur bantuan orang tua; (4) *learning at home* atau belajar di rumah, dengan menyediakan informasi dan gagasan kepada keluarga bagaimana menolong dan mendorong anaknya belajar di rumah; (5) *decision making* atau pengambilan keputusan, dengan melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan tentang program-program sekolah, melalui Persatuan Orang tua Murid dan Guru (PMOG) misalnya; (6) *collaborating with community* atau bekerjasama dengan masyarakat, dalam bentuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan sumber daya dan pelayanan dari masyarakat untuk menunjang program-program sekolah, kegiatan di rumah, dan pengembangan belajar anak.

**f. Partisipasi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama**

Peran serta tokoh masyarakat dan agama tidak hanya berwujud pemberian bantuan uang atau tenaga tetapi juga berupa bantuan secara suka rela membimbing siswa. Oleh itu program kerja sekolah perlu didiskusikan dengan tokoh masyarakat dan agama agar berorientasi pada peningkatan mutu, bukan untuk kepentingan birokrasi.

**e. Partisipasi Dunia Usaha dan Industri**

Dunia usaha dan dunia industri memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendidikan, baik dalam perencanaan, proses peningkatan kualitas pendidikan, maupun pemanfaatan hasil pendidikan. Dunia usaha dan industry dapat dijadikan mitra sekolah sehingga *demand approach* dapat benar-benar dilaksanakan oleh setiap sekolah dalam hal perbaikan kualitas pendidikan. Dunia usaha dan dunia industry merupakan salah satu *stakeholders* pendidikan, yang dapat menopang terjadinya pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peran serta dunia usaha dan industry dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi penggalangan dana, pengadaan fasilitas sarana dan prasarana sekolah, penciptaan relasi eksternal yang dapat memberikan akses yang lebih luas dalam membangun hubungan sekolah dengan masyarakat, serta membantu pengembangan SDM pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan teknik-teknik pengembangan mutu.

**f. Partisipasi Kelembagaan Sosial Budaya**

Terdapat jenis-jenis instansi-instansi atau kelompok-kelompok kelembagaan sosial budaya antara lain: paguyuban orang tua siswa, lembaga adat dan tokoh adat, lembaga keagamaan, PKK, kelompok bisnis, kelompok seni, organisasi profesi, gerakan nasional, orang tua asuh (GNOTA), puskesmas. Mereka dapat berperan serta dalam menuangkan tenaga, pikiran, keahlian, dana dan lain sebagainya.

**B. Kerangka Pikir**

Pengembangan program PAUD di masyarakat dewasa ini, partisipasi aktif seluruh warga masyarakat dipandang sangat penting artinya bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tercapainya tujuan secara mantap. Oleh karena itu partisipasi masyarakat selalu diusahakan untuk dikembangkannya sejak awal pelaksanaan program, dan diharapkan bisa berlangsung terus sampai tercapainya tujuan program.

Dalam rangka mengembangkan peran serta masyarakat khususnya program PAUD, para tokoh masyarakat baik formal maupun non formal sangat penting peranannya, terutama dalam mempengaruhi, memberi contoh dan menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat lingkungan guna mendukung keberhasilan program. Lebih-lebih dalam masyarakat pedesaan, peran para tokoh masyarakat tersebut sangat kuat pengaruhnya, dan bahkan seringkali menjadi tokoh panutan dalam segala kegiatan hidup sehari-hari warga masyarakat. Selain itu yang berperan aktif adalah orangtua yang lebih luas lagi menyangkut kegiatan pendampingan, pendampingan disini adalah orangtua akan selalu mendampingi dan mengamati putra-putrinya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sebagian besar pelaksana PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah organisasi kemasyarakatan.

Masyarakat merupakan komponen utama terselenggaranya program PAUD. Kontribusi masyarakat perlu dioptimalkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD seperti keikutsertaan masyarakat dalam perumusan visi dan misi. Masyarakat dapat memberikan sumbangsihnya kepada sekolah dengan memberikan masukan-masukan, dukungan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah, terutama dalam penyusunan program-program sekolah. Sehingga pelaksanaan kegiatan dan tercapainya tujuan secara mantap, dan diharapkan bisa berlangsung terus sampai tercapainya tujuan program.

Partisipasi dalam perencanaan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi dalam evaluasi

1. Orang tua

2. Tokoh masyarakat

3. Dudi

4. Lembaga (PNPM)

**Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir**